

**DAMPAK PENERANGAN TENAGA RAKYAT PADA MASA
PENDUDUKAN JEPANG**

**Risma Juniati Tambunan¹, Tymoty Doli Sinaga², Luthfan Aziz³, Rosmaida Sinaga⁴
Universitas Negeri Medan**

Article Info

Article history:

Published Mei 31, 2024

Kata Kunci:

Penerangan Tenaga Rakyat,
Pendudukan Jepang, Dampak
Sosial, Dampak Ekonomi,
Dampak Politik.

ABSTRAK

Selama masa pendudukan Jepang, kebijakan penerangan tenaga rakyat menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal di berbagai wilayah. Penelitian ini meneliti dampak sosial, ekonomi, dan politik dari penerangan tenaga rakyat tersebut. Dari segi sosial, kebijakan ini mengakibatkan terputusnya ikatan keluarga dan sosial, serta menciptakan ketidakstabilan dengan meningkatnya jumlah pengembara dan pengungsi. Secara ekonomi, meskipun pekerja menerima upah, seringkali upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, sementara sektor-sektor lain mengalami kekurangan tenaga kerja. Dampak politiknya termanifestasi dalam ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pendudukan Jepang, yang sering kali berujung pada perlawanan aktif. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konsekuensi penerangan tenaga rakyat dalam konteks pendudukan Jepang, dan memperkuat pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

1. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, Jepang resmi mengambil-alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat. merupakan tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II. Lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah koloni mereka yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia pada saat itu yang diserahkan kepada pemerintah militer Dai Nippon (Ishak, 2012). Pada 1 September 1939, Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan:

Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari Sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii (Ishak, 2012).

2. METODOLOGI

Teknik pengumpulan data dari studi ini bisa digunakan dalam Teknik Simak. Teknik Simak ini digunakan melalui apapun, yaitu dengan menggunakan tekniklibat cakap, teknik mencatat. Studi ini menggunakan instrument dengan peneliti itu sendiri yang akan merupakan seseorang yang menjadi pelaksana, perencana, penafsir data, pengumpulan data, penganalisis, dan diakhiri dengan menjadikan pelapor dari hasil penelitian. Dengan teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan transkrip data dan teknik reduksi, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dan data non – numerik.

Penelitian kualitatif diungkapkan dengan kata lain ini digunakan untuk memahami konsep, pemikiran atau pengalaman, bagi peneliti. Data kualitatif didefinisikan sebagai data non – numerik, sebagai contoh seperti teks, video, foto, atau rekaman video, bahkan rekaman audio. Nah jenis data ini dapat digunakan dengan menggunakan catatan atau wawancara mendalam, dan dianalisis menggunakan teknik dasar atau teknik tematik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Kaum Nasionalis Indonesia Terhadap Kehadiran Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang telah resmi menduduki Indonesia yang langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominansi Barat. Secara fisik Jepang memiliki bentuk yang hampir sama dengan orang Indonesia dan inilah yang menjadi keuntungan tersendiri buat Jepang. Oleh karena itu, Jepang dapat dengan mudah menyebarkan semboyan 3A mereka, yaitu (1) Jepang Cahaya Asia, (2) Jepang Pemimpin Asia, dan (3) Jepang Pelindung Asia. Dari semboyan ini berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai pembebas mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Selanjutnya Jepang sendiri menyadari bahwa besarnya pengaruh barat yang masih melekat pada diri rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa barat telah lama menjajah Indonesia. Masa pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun ini merupakan masa pemerintahan yang singkat jika dibanding dengan pemerintahan sebelumnya (Belanda) (Yasmis, 2007).

Jepang pada saat memerintah Indonesia memperlakukan rakyat Indonesia berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat kedatangan Jepang yang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya Jepang memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik, mengingat Indonesia dari Jepang sama-sama dari bangsa Asia. Berbeda dengan Belanda mendekonstruksi Islam menggantikannya dengan hukum adat, disini ulama dikontrol ketat sampai kehilangan basis kekuasaannya sehingga perjuangan yang terjadi anti Belanda. Tetapi, Jepang berusaha belajar dari kebijakan Belanda sehingga relatif berdamai dengan Islam. Kemudian Jepang berusaha menarik keterlibatan tokoh-tokoh umat Islam untuk meredam gerakan perlawanan umat Islam (Yasmis, 2008).

Jepang berharap melalui PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) para pemimpin Indonesia mampu membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaga dalam rangka perang melawan Sekutu. Selanjutnya PUTERA dalam pergerakannya tidak menghasilkan karya konkret. Namun setidaknya, mampu membangun mentalitas bangsa dalam perisapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkembangnya PUTERA ke seluruh plosok Indonesia membuat para pemuda Indonesia melakukan perkumpulan-perkumpulan yang disitu bertujuan untuk memperjuangkan serta meraih kemerdekaan yang telah didamba-dambakan oleh bangsa Indonesia sebab Jepang telah memberi janji ingin membantu cita-cita tersebut (Yasmis, 2007). Dengan demikian, pada masa-masa awal Jepang mendarat mendapat sambutan yang baik dari pihak Indonesia. Keadaan ini ditunjukkan dengan kesediaan beberapa tokoh utama Indonesia,

seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, yang bersedia untuk bekerjasama dengan Jepang. Sikap seperti ini sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan keduanya pada masa Hindia Belanda di mana mereka dan beberapa tokoh lainnya dengan tegas menempuh sikap menolak bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kesediaan kerjasama ini muncul dengan alasan adanya keyakinan pada mereka, bahwa Jepang akan mendukung upaya mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setidaknya berkeinginan mendukung Indonesia untuk memiliki pemerintahan sendiri, dan dapat berdiri sendiri dengan sejajar seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya. Dengan demikian inilah strategi Jepang dalam mendapatkan simpatik terhadap rakyat Indonesia agar Indonesia dapat membantu Jepang pada saat itu, akan tetapi semuanya hanya janji-janji manis yang diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2009). Selain di Jawa, Jepang juga mendapatkan keberhasilan dalam propagandanya di beberapa daerah lain, salah satunya adalah Sulawesi selatan.

Keberhasilan propaganda Jepang di Sulawesi Selatan juga ditunjukkan oleh golongan nasionalis. Kaum nasionalis di daerah ini membentuk suatu panitia untuk menyambut pasukan Jepang yang bertajuk Panitia Keamanan Umum (Chian Iji Kai). Tujuan panitia penyambutan ini adalah untuk memelihara ketertiban dan mengganti para pejabat Belanda yang ditawan oleh Jepang. Hal ini juga menandakan bahwa memang antara Jepang dengan golongan nasionalis Sulawesi Selatan sudah ada pembicaraan sebelumnya (Sahajuddin, 2019).

Mobilisasi Rakyat

Awal kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia dikarenakan Jepang dianggap sebagai pembebas dari penjajah bangsa asing. Rakyat Indonesia juga percaya akan datang penyelamat dari penjajah bangsa Barat sesuai dengan ramalan “Jayabaya”. Kemenangan Jepang diawal peperangan ternyata tidak bertahan lama. Sekutu mulai membalas kekalahan tersebut. Perlahan-lahan namun pasti sekutu mulai memukul mundur pasukan Jepang di Pasifik pada awal pertengahan Tahun 1942 (Triyanto, 2014). Kekalahan pertama Jepang terjadi pada pertempuran Laut di Midway, bulan Juni 1942. Bulan November 1942, Amerika Serikat juga berhasil merebut Kepulauan Solomon dari tangan Jepang. Sekitar 24.000 orang tentara Jepang tewas dalam perang ini. Serangan pihak sekutu selanjutnya adalah merebut dan menghancurkan Kota Rabaul yang merupakan benteng paling kuat dari tentara Jepang serta penghalang paling besar sekutu menuju ke Tokyo (Ojong, 2005). Kekalahan Jepang di awal pertengahan Tahun 1942 yang membuat Jepang harus memberikan prioritas utama untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha melakukan mobilisasi dan pengendalian dalam berbagai bidang pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berusaha diorganisasikan dan dikerahkan agar kooperatif terhadap kemenangan perang Asia Timur Raya (Ricklefs, 2008).

Kehidupan Masyarakat Masa Pendudukan Jepang

- Bidang Politik Dalam bidang politik, tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak Jepang adalah membekukan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berbau politik dilarang. Seolah-olah pemerintah militer Jepang menerapkan sistem fasisme dan menetapkan garis politik pemerintah sebagai satusatunya aliran yang harus ditaati. Rakyat tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat, memang menakjubkan, menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi.

Keunggulannya merupakan faktor yang menentukan kepemimpinan Jepang di antara bangsa Asia (Mulyana, 2008). Sebenarnya pemerintahan militer Jepang merupakan pemerintahan yang diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Batavia (sekarang Jakarta).

Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi (Sumatera Barat). Sedangkan Indonesia bagian Timur diperintah oleh tentara ke-2 (angkatan laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulawesi Selatan). Pemerintah angkatan darat disebut Gunseibu, dan pemerintah angkatan laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapus. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang Residen (Syucokan). Karesidenan terdiri dari Kotapraja (Syi), Kabupaten (Ken), Kawedanan atau distrik (Gun), Kecamatan (Son), dan Desa (Ku) (Muttaqin, dkk, 2011). Dengan berbagai kebijakan politik yang ada secara otomatis mengakibatkan kehidupan masyarakat pribumi saat itu terkekang dan berorientasi pada usaha-usaha perang yang dilakukan oleh Jepang.

- Bidang Sosial – Ekonomi

Di bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang).
- b. Sistem tonarigumi (organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang).
- c. Monopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.
- d. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang (Zulkarnain, 2012).

Pada bidang kehidupan sosial masyarakat sangat terdampak dari diberlakukannya Romusha, karena melihat dari praktek-praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah banyak menghancurkan sumber daya alam, sehingga menimbulkan krisis ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Kemudian luasnya daerah pendudukan Jepang, memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu, lapangan udara, jalan raya dan Gudang. Tenaga yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 145 penduduknya, sehingga kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa istilah terkenalnya Romusha. Pada awalnya dilakukannya dengan sukarela, lambat laun terdesak oleh perang pasifik sehingga pengerahan tenaga diserahkan kepada Romukyokai yang ada di setiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali dalam tugas karena meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi kepada romusha tersebut (Isnaeni dan Apid, 2008).

- Bidang Pendidikan

Keadaan bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Pada masa Belanda, yang dapat merasakan pendidikan formal hanya rakyat pribumi untuk kalangan menengah keatas, sementara rakyat kecil pribumi tidak bisa memiliki kesempatan. Sehingga pada masa Jepang mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini sebagai satu bentuk warisan Jepang (Isnaeni dan Apid, 2008). Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer di kalangan masyarakat. Karena sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Sehingga siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Selanjutnya, hal yang menarik adalah sebuah pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari (Seikerei). Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan hal ini terutama dari kalangan umat Islam. Sehingga penerapan Seikerei ini ditentang oleh kalangan umat Islam, salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pesantren Sukamanah, Jawa Barat (Fadila & Kumalasari, 2019).

- Bidang Militer

Jepang telah mendirikan organisasi pergerakan berbasis militer semata-mata untuk kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Pada Tahun 1943 Jepang semakin intensif dalam mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Karena situasi di medan perang Asia-Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Dari situasi Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 147 tersebut, maka Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang bisa diikutsertakan dalam pertempuran dalam menghadapi Sekutu. Berdasarkan hal tersebut, Jepang mempersiapkan barisan militer dengan mendirikan beberapa gerakan-gerakan berbasis militer, sebagai berikut: 1) Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun, 2) Losyi Seinendan, yaitu barisan cadangan tauseinendan putri, 3) Bakutai, yaitu pasukan berani mati, 4) Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan Konon disebut Hokokudan, 5) Hizbullah, yaitu barisan semi militer untuk orang Islam, 6) Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 – 25 tahun, 7) Hokokai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa, 8) Suisyintai, yaitu barisan pelopor, 9) Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943, 10) Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944, 11) Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943 (Zulkarnain, 2012). Dari pembentukan berbagai organisasi militer tersebut kehidupan masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk masuk di berbagai organisasi-organisasi semi militer bentukan Jepang baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan atau dalam arti kata lain adalah mobilisasi militer.

Dampak Pendudukan

Jepang Pendudukan Jepang yang terbilang singkat, yakni dari Tahun 1942-1945 meninggalkan dampak yang luas bagi bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan mobilisasi untuk kepentingan perang semata. Eksploitasi besar-besaran pada bidang sumber daya alam bangsa Indonesia membuat perekonomian rakyat Indonesia hancur, khususnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan-pekerjaan di industri-industri tertentu di masa kolonial Belanda. Produksi perkebunan, seperti teh, kopi, gula merosot tajam akibat digantikan oleh padi, jarak, rosela, kapas, dan lain sebagainya. Kebijakan wajib serah padi membuat rakyat Indonesia dilanda kelaparan, karena kelangkaan padi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kematian. Pengerahan Romusha secara besar-besaran juga berdampak perubahan sosial di pedesaan, di desa sebagian besar hanya tinggal anak-anak, wanita, dan orang yang cacat. Pemuda desa banyak yang melarikan diri ke perkotaan karena takut dijadikan Romusha (Kurasawa & Sulisty, 1993).

Namun, terdapat beberapa dampak positif bagi Indonesia, yaitu Jepang sebagai jembatan menuju kemerdekaan. Organisasi bentukan Jepang yang diharapkan dapat memobilisasi rakyat Indonesia, justru dimanfaatkan oleh kalangan tokoh nasionalis dan Islam untuk mengobarkan semangat nasionalisme pada rakyat. Menjelang kekalahan Jepang tokoh-tokoh nasionalis Indonesia memanfaatkan BPUPKI untuk menuju Indonesia merdeka. Pada bidang militer, rakyat Indonesia menjadi terdidik dan terlatih tentang kemiliteran yang berguna untuk mempertahankan kemerdekaan di kemudian hari. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia menyebar luas sampai ke pelosok desa, karena ketika itu bahasa Indonesia diperbolehkan dipergunakan dengan alasan agar propaganda kebijakan Jepang mudah dipahami oleh rakyat apabila menggunakan bahasa Indonesia (Notosusanto, 1979).

Dampak bagi bangsa Jepang sendiri dapat terlihat jelas pada bidang ekonomi dan militer. Pendudukan Jepang yang singkat di Indonesia, bukan berarti tidak menguntungkan bagi Jepang. Sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia telah memfokuskan pada eksploitasi di bidang sumber daya alam, terutamanya minyak bumi. Tarakan merupakan salah satu penghasil minyak mentah di Indonesia. Pihak Jepang setelah memperbaiki fasilitas produksi dan penyulingan minyak saecara keseluruhan berhasil meningkatkan produksi minyak Tarakan. Produksi minyak mentah tahun 1943 tercatat 50 juta barel Yusuf Perdana & Rinaldo Adi Pratama 150 per tahun atau hampir menyamai jumlah produksi minyak masa damai yang mencapai 65 juta barel per tahun. Setiap hari kapal tanker Jepang berangkat membawa minyak dari dermaga di Lingkas menuju Kepulauan Jepang. Eksploitasi ini sangat menguntungkan bagi industri Jepang di negeri induk dan kebutuhan perang. Minyak bumi tersebut digunakan sebagai bahan bakar kapal-kapal tempur Jepang selama perang.

4. KESIMPULAN

Kedatangan Jepang yang dianggap sebagai Saudara Tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun, perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara, serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang.

Mobilisasi massa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, bahkan korban jiwa, yaitu romusha yang kemudian oleh pemerintah Jepang disebut sebagai prajurit pekerja.

Pada masa pendudukan Jepang, pembentukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian pergerakan terus dilakukan oleh kaum nasionalis baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah.

Program militer pertama Jepang adalah Heiho, yaitu perekrutan serdadu pembantu lapangan, yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Keikutsertaan dalam pendidikan militer itu yang kemudian menjadi bekal pemuda-pemuda Indonesia dalam perang revolusi kemerdekaan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, M. H., & Hafidz Maksum. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar*. Vol 3. NO. 4.
- Agus Susilo & Isbandiyah. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya pergerakan bangsa indonesia. *Jurnal HISTORIA*. Vol 6. No. 2.
- Ahmad, Mirza Ghulma & Muhammad Arya Mahasta. (2020). Dinamika Sarekat Islam dan Islamika: *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 20. No. 2.
- Ahmadin. (2017). *Pergerakan Nasional dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Masa Kini*. Ambon: Universitas Patimura.
- Ahmadin. (2017). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. 2016. Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 13. No. 2.
- Amril, Oslan Irma. (2015). Aspek Psikologi Sosial Jagun Lanfu Sebagai Korban Kekerasan Seksual Penduduk Jepang di Indonesia. *Jurnal Suluah*. Vol. 16. No. 20.
- Anam, Choirul. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Sidoarjo: Duta Aksara Mulia.
- Anshory & Nasruddin. (2010). *Matahari Pembaharuan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Arif, Muhammad. (2016). *Revolusi Nasional Indonesia Perspektif Pendidikan Karakter*. Depok: Para Cita Press.